

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Angka penggundulan hutan Indonesia dalam kurun waktu 2012-2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa hutan merupakan salah satu aspek penting dalam lingkungan, ekonomi, dan mitigasi perubahan iklim, oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk menekan laju peningkatan penggundulan hutan. Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, mencakup bantuan dari dalam negeri (domestik) dan juga secara internasional. Bentuk upaya dalam negeri yang telah dilakukan pemerintah adalah dibuatnya beberapa kebijakan seperti melakukan restrukturisasi dalam bidang kehutanan, dan rehabilitasi sumber daya hutan. Selain itu pemerintah juga telah melakukan tinjauan hukum guna menekan angka penggundulan hutan. Dalam cakup internasional Indonesia melakukan berbagai kesepakatan kepada beberapa negara dalam bidang kehutan salah satunya dengan Korea Selatan.

Korea Selatan merupakan salah satu negara yang bisa merehabilitasi hutannya dengan waktu yang singkat. Disamping itu hubungan kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam bidang kehutanan telah berlangsung lama. Melihat kondisi hutan Indonesia yang membutuhkan pembenahan secepat mungkin, Korea Selatan menyalurkan bantuan ke Indonesia dengan maksud menekan angka penggundulan hutan. Bantuan yang disalurkan berbentuk bantuan pendanaan, bantuan teknis, dan bantuan ilmu pengetahuan. Penyaluran bantuan tersebut merupakan cara mewujudkan kepentingan nasional, baik dari pihak Korea Selatan maupun pihak Indonesia. Untuk Korea Selatan sendiri, dari penyaluran bantuan tersebut akan membantu perusahaan Korea Selatan untuk melakukan investasi yang konsisten di Indonesia, untuk Indonesia dengan diterimanya bantuan ini dapat mewujudkan tujuan Indonesia yaitu menekan angka penggundulan hutan.

Dengan dilakukannya kerjasama dengan Korea Selatan, Indonesia memenuhi kepentingan nasionalnya dalam bidang lingkungan, yakni dengan mempromosikan pengelolaan ekowisata dan juga pengembangan Taman Nasional. Indonesia juga dapat mempromosikan energi terbarukan berbasis kehutanan, yakni pelet kayu. Indonesia juga mengelola serta melakukan restorasi pada lahan gambut yang telah hilang, serta dapat melakukan pengelolaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Korea Selatan juga telah memenuhi kepentingan nasionalnya dalam sektor ekonominya yang berupa investasi di Indonesia. Korea Selatan telah mendirikan 12 perusahaannya di Indonesia dan menggunakan 68 persen dari total 279.000 hektar yang direncanakan untuk daerah yang akan direstorasi.

Dalam penyaluran bantuan ini, Korea Selatan dengan Indonesia telah mengadakan beberapa forum kehutanan. Dari forum ini, telah dinyatakan bahwa kedua negara sepakat untuk melakukan pertukaran informasi mengenai penghijauan biomassa, kerjasama antara organisasi negara masing-masing terkait dengan rekreasi kehutanan, serta untuk membangun ikatan akademik antar universitas. Masing-masing menteri dari kedua negara telah mencapai kesepakatan untuk memperluas kerjasama dalam investasi dan bantuan pembangunan resmi untuk ekowisata. Bantuan dari Korea Selatan dimanfaatkan oleh Indonesia melalui dibuatnya beberapa proyek yang dimaksudkan untuk menangani penggundulan hutan yang terjadi. Proyek-proyek tersebut antara lain: *Rumpin Seed Source and Nursery Center (RSSNC)*, *Sentul Eco Edu Tourism Forest*, *KPH/REDD+ in Riau*, *Tunak Eco Tourism Park*, serta *Peatland Restoration*. Setelah proyek-proyek yang dilakukan dengan Korea Selatan telah habis masa kontraknya, maka proyek tersebut akan diambil alih oleh masyarakat untuk dikelola lebih lanjut. Korea Selatan akan memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola, menerima tamu, memberikan tarif dari kunjungan tamu sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan. Negara juga mendapatkan keuntungan dari pemungutan pajak dari proyek yang dikelola masyarakat tadi.

Hasil dari proyek-proyek tersebut tentu sesuai target untuk memperbaiki efek dari penggundulan hutan di Indonesia. Seperti pada proyek *Rumpin Seed Source and Nursery Center* sudah mencapai target yakni mengembangkan teknologi rehabilitasi lahan dan hutan dengan cara saling bertukar ilmu pengetahuan dalam

bidang perbenihan dan persemaian. Kemudian pada proyek *Sentul Eco Edu Tourism Forest* dan *Tunak Eco-Tourism Park* juga telah mencapai targetnya yakni pengelolaan sumberdaya hutan yang berorientasi lingkungan, pendidikan dan wisata berbasis *eco-tourism*. Kemudian proyek *Peatland Restoration* dan *FMU/REDD+ in Riau Province* juga sudah mencapai target yakni pemulihan serta konservasi lahan gambut.

Tentunya dalam penyaluran bantuan dari Korea Selatan ke Indonesia dalam bidang kehutanan ini memiliki beberapa peluang dan hambatan. Dengan adanya bantuan dari Korea Selatan, Indonesia mendapat kesempatan untuk mempererat hubungannya dengan Korea Selatan, sekaligus dapat menangani penggundulan hutan yang terjadi. Dari Kerjasama ini pula, Indonesia mendapatkan peluang untuk membantu pelaksanaan pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur. Untuk hambatannya, dalam melaksanakan proyek tentunya melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan segala birokrasinya yang tentunya menyita banyak waktu. Regulasi yang ketat juga menjadi salah satu hambatan.

Hubungan bilateral kedua negara harus memenuhi masing-masing aspek. Dalam penelitian ini, pihak Korea Selatan dapat mengeksplor, sedangkan pihak Indonesia dapat menerima materi atau pengetahuan. Korea Selatan juga memberikan hubungan yang baik dalam sektor kehutanan. Bagaimana pun perusahaan-perusahaan Korea beroperasi juga di Indonesia. Dengan diadakannya kerjasama ini, Korea mendapatkan image dalam merestorasi hutan dan juga image pada sektor lainnya seperti Hallyu dan korean wave. Manfaat dalam kerjasama ini tidak hanya berbentuk pendanaan, tetapi juga dalam bentuk lainnya seperti teknis serta pengetahuan.

## 1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis menemukan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak KIFC dan juga pihak Indonesia. Pihak KIFC mengalami kendala terkait regulasi untuk melakukan tahap awal proyek. Oleh karena itu, pihak Indonesia diharapkan mempercepat serta mempermudah proses regulasi terkait lingkungan sekitar untuk proyek-proyek KIFC yang akan datang. Kemudian, pihak KIFC juga mengalami kendala saat

implementasi proyek di daerah yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, serta LSM. Diharapkan pihak KIFC lebih intens lagi dalam melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, serta LSM agar kerjasama dalam realisasi proyek akan lebih cepat.

Kemudian, sampai saat ini proyek-proyek pemanfaatan bantuan Korea masih difokuskan di Pulau Jawa dan Sumatra. Sedangkan persebaran penggundulan hutan Indonesia masih berpotensi semakin meluas. Oleh karena itu, diharapkan untuk kedepannya Indonesia dapat mengkaji pemanfaatan bantuan Korea yang selanjutnya dapat mencakup wilayah lain di Indonesia, seperti di Pulau Kalimantan dan Sulawesi.